

**PENGARUH AKUNTABILITAS PEGAWAI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**

OLEH :

NAMA : FITRI SURYANI
NOMOR MAHASISWA : 197121010
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

PENGARUH AKUNTABILITAS PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

Oleh

FITRI SURYANI

Permasalahan akuntabilitas merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksplanatif asosiatif dengan metode kuantitatif sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif dan SPSS 22 dalam mengolah data penelitian. Jumlah populasi dan sampel adalah 29 orang sedangkan teknik pengambilan sampel adalah teknik sensus yang ditujukan kepada pegawai bidang pengelola keuangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, hal ini diketahui dari uji parsial diketahui H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel Akuntabilitas Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pimpinan BKPAD diharapkan untuk memberikan pengawasan lebih kepada pegawai, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, karena dalam mengelola keuangan sering terjadi kecurangan yang dapat berakibat fatal bagi instansi. Pimpinan diharapkan juga dapat lebih memotivasi pegawai, mengingat akuntabilitas pegawai sudah baik dalam mengelola keuangan sehingga pimpinan dapat memberikan reward kepada pegawai yang sudah berprestasi terutama pada bagian pengelola keuangan karena tugasnya tergolong sulit dan kuantitas pekerjaannya cukup banyak. Pegawai diharapkan untuk selalu meningkatkan prestasi yang diperoleh dalam mengelola keuangan karena laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi. Apabila akuntabilitas instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pegawai, Pengelolaan, Laporan, Keuangan.

**EFFECT OF EMPLOYEE ACCOUNTABILITY ON THE QUALITY OF FINANCIAL
STATEMENTS IN THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY
OF PELALAWAN DISTRICT**

ABSTRACT

By

FITRI SURYANI

The issue of accountability is one of the problems in the implementation of local government which is currently being reviewed by the government. The phenomenon that can be observed in current financial management is the strengthening of demands for the implementation of public accountability and public transparency by public organizations such as government work units, both central and regional. One of the significant changes is a change in government accounting because through the accounting process financial information will be produced which is available to various parties to be used according to their respective purposes. The most desirable change is the Government Accounting Standards. The preparation of financial reports that is guided by government accounting standards is actually in the context of increasing the quantity of financial reports, so that the financial reports in question can increase their credibility and in turn will be able to realize transparency and accountability of local government financial management so that good governance can be achieved. The main objective of this research is to know and analyze the employee accountability to the quality of financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency. The type of research used in this research is associative explanative with quantitative methods while the data analysis technique uses descriptive and SPSS 22 in processing research data. The number of population and sample is 29 people, while the sampling technique is a census technique aimed at employees of financial management. The results of the study concluded that Employee Accountability had a significant effect on the Quality of Financial Statements at the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency, it was known from the partial test that H_0 was rejected and H_a was accepted, meaning that there was a significant influence between the Employee Accountability variable on the Quality of Financial Statements. BKPAD leadership is expected to provide more supervision to employees, especially in terms of regional financial management, because in managing finances, fraud often occurs which can have fatal consequences for the agency. Leaders are also expected to be more motivating employees, given the accountability of employees is good in managing finances so that leaders can provide rewards to employees who are already performing, especially in the financial management section because their duties are classified as difficult and the quantity of work is quite large. Employees are expected to always improve their achievements in managing finances because financial reports are the basis for measuring agency performance accountability. If the accountability of government agencies that present financial reports is in accordance with Government Accounting Standards, it will produce quality financial reports.

Keywords: Accountability, Employees, Management, Reports, Finance.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan”** Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. H. Rosmayani, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Penulis

Fitri Suryani



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	 12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1. Konsep Administrasi	12
2.1.2. Konsep Organisasi.....	15
2.1.3. Konsep Manajemen.....	17
2.1.4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	19
2.1.5. Konsep Pemerintahan Daerah	23
2.1.6. Konsep Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	25
2.1.7. Konsep Akuntabilitas	28
2.1.8. Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36
2.1.9. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	45
2.2. Kerangka Pemikiran.....	52
2.3. Hipotesis.....	52
2.4. Penelitian Terdahulu	53
2.5. Konsep Operasional	58
2.6. Operasionalisasi Variabel.....	62
2.7. Skala Pengukuran.....	64
 BAB III METODE PENELITIAN	 67
3.1. Tipe Penelitian.....	67
3.2. Lokasi Penelitian.....	67
3.3. Populasi dan Sampel	68
3.4. Teknik Penarikan Sampel.....	69
3.5. Jenis dan Sumber Data	69
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.7. Teknik Analisa Data.....	70
3.8. Pengujian Hipotesis.....	72

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	74
4.1. Kabupaten Pelalawan	74
4.2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan	77
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
5.1. Gambaran Subjek Penelitian	100
5.2. Uji Kualitas Data	102
5.3. Analisis Data Tentang Akuntabilitas Pegawai (X)	104
5.4. Analisis Data Tentang Laporan Keuangan (Y)	113
5.5. Analisis Data dan Hasil Penelitian	123
5.6. Pembahasan	127
BAB VI PENUTUP	145
6.1. Kesimpulan	145
6.2. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kota Pekanbaru.....	77
IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ..	111



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Guru Pada SMPN 8 Kota Pekanbaru yang Mendapat Sertifikasi Guru	9
I.2 Daftar Prestasi Siswa SMPN 8 Kota Pekanbaru	10
I.3 Daftar Prestasi Tenaga Pendidik Di SMPN 8 Kota Pekanbaru.....	12
II.1 Penelitian Terdahulu	16
II.2 Operasionalisasi Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kota Pekanbaru	82
III.1 Tabel Populasi dan Sampel Penelitian	88
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kota Pekanbaru.....	94
IV.1 Jumlah Guru, Tenaga Pendidik, PTK dan Peserta Didik di SMPN 8 Kota Pekanbaru	104
IV.2 Jumlah Sarana dan Prasarana di SMPN 8 Kota Pekanbaru	104
IV.3 Jumlah Rombongan Belajar SMPN 8 Kota Pekanbaru.....	105
V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	106
V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	106
V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	107
V.4 Uji Validitas (X) Sertifikasi Guru	108
V.5 Uji Validitas (Y) Kinerja Guru	108
V.6 Hasil Uji Reliabilitas	109
V.7 Tanggapan responden Kompetensi Pedagogik	113
V.8 Tanggapan responden Kompetensi Profesional	116
V.9 Tanggapan responden Kompetensi Sosial	118
V.10 Tanggapan responden Kompetensi Kepribadian	120
V.11 Rekapitulasi tanggapan responden Sertifikasi Guru	121
V.12 Tanggapan responden tentang indikator Perencanaan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran.....	125
V.13 Tanggapan responden dalam indikator Satuan Pendidikan Kelas, Semester dan Topik Bahasan	127
V.14 Tanggapan responden tentang indikator pelaksanaan kegiatan pembelajaran	130
V.15 Tanggapan responden indikator evaluasi pembelajaran	132
V.16 Uji Normalitas.....	135
V.17 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana	136
V.18 Hasil Uji Parsial (Uji t)	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab penuh terhadap masyarakat atau publik, karena pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik yang dapat membantu kebutuhan dari masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal ini menuntut pemerintah menyediakan anggaran khusus yang terkait pelayanan publik, dengan adanya anggaran yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan pelayanan publik menuntut pemerintah untuk cermat dalam pengelolaan anggaran yang ada.

Memasuki era reformasi yang diikuti dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menyebabkan berkembangnya organisasi sektor publik yang sangat cepat. Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal di Indonesia menuntut setiap daerah untuk dapat melakukan pengelolaan anggaran yang tepat. Pengelolaan yang tepat dapat tercapai jika pemerintah daerah pandai dan cermat dalam memilih penataan lingkungan kerja serta sistem akuntansi yang baik untuk anggarannya. Pemilihan yang cermat serta tepat dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dalam kinerja penyusunan laporan keuangannya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri, karena semua peraturan dan harapan masyarakat adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan serta

menjunjung tinggi akuntabilitas publik, meskipun sekarang kita merasakan masih sangat sulit untuk menuntut pemerintahan daerah memberikan informasi secara luas terkait pertanggungjawaban laporan keuangannya, hal itu terbukti dengan masih adanya praktek korupsi yang menjerat pejabat wajar jika terdapat pernyataan ketidakpuasan dari masyarakat luas terkait kepemimpinan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya berorientasi pada pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif, sehingga tujuan utama dari organisasi sektor publik dapat terwujud. Dengan adanya perkembangan pada organisasi sektor publik di Indonesia pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Stelconi (2002) dalam Aliyah dan Nahar, 2012).

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan serta akuntabilitas pemerintah yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Kita ketahui bahwa memang akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002). Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintah untuk itu laporan keuangan harus disusun secara komprehensif (Mardiasmo, 2002).

Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Pengertian *good governance* menurut (Mardiasmo, 2002) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Good governance menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas partisipasi, keadilan, dan kemandirian, serta sumber daya pemerintah daerah yang berbeda dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-beasarnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara. Penerapan *good governance* tidak lepas dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, pengertian audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, selain itu audit kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Konsep ekonomis, efisiensi, dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Untuk itulah adanya audit kinerja pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan karena selain dapat menilai akuntabilitas laporan keuangan, juga dapat menilai kinerja pegawai. Penilaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana.

Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus memiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan, persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Permasalahan akuntabilitas merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan Negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada

standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah pada bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap penggunaan aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berupaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan, bidang pendapatan dan aset daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam

melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah. Adapun sistem-sistem informasi tersebut antara lain Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan, Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIMDIA), Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET), Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik membahas kebenarannya, dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena – fenomena di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Akuntabilitas Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimanakah Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimanakah Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik.

2. Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dapat bermanfaat bagi lembaga – lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji topik yang sama.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan teori akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan di lingkungan jurusan Ilmu Administrasi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pegawai BPKAD dalam menegakkan akuntabilitas dalam bekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi

Menurut Handyaningrat (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut : Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Adminsitasi dalam arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (2002:2). Administrasi dalam arti luas yaitu : Leonard D. White dalam bukunya *Introduction to The Study of Public Administration* mengatakan :

Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale... etc. (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya). Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari

kelompok-kelompok yang berada dalam suatu negara, yang bekerja di bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya administrasi perkantoran modern mengatakan bahwa : “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.” Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah “tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya”. (dalam Ayub, 2007:30).

Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Menurut Ismail Nawawi administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. (Nawawi, 2009:33)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai administrasi dalam arti luas. Menurut Sondang P. Siagian administrasi dalam pengertian luas adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. (dalam Ayub, 2007:30). Apabila melihat pendapat dari Sondang P Siagian, administrasi dapat diilustrasikan seperti pemain sepak bola yang melakukan sebuah kerjasama bersama pemain lainnya untuk memenangkan timnya dalam sebuah pertandingan.

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut ahli lainnya, yaitu Ismail Nawawi, mengatakan bahwa: Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian

kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien. (Nawawi, 2009:35).

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

2.1.2. Konsep Organisasi

Dalam pengertian sederhana organisasi sering diartikan sebagai kelompok orang yang bekerjasama dan ingin mencapai tujuan bersama. Organisasi didirikan karena beberapa tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan bersama-sama, apakah tujuan itu berupa laba, pemberian pendidikan, sosial dan lain-lain.

Dalam literatur dewasa ini, arti organisasi beraneka ragam. Walaupun banyak perbedaan dalam memberikan pengertian atau definisi organisasi oleh beberapa ahli manajemen, tetapi perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai elemen dasar yang sama yaitu adanya sekelompok orang, kerjasama, proses pembagian kerja, pengaturan hubungan dan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Barnard dalam buku Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi adalah suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan.

Atmosudirdjo dalam buku Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang tertentu.

Istilah organisasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Istilah sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam masyarakat. Organisasi sosial yang merupakan gabungan dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat, dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur. Secara luas organisasi sosial diartikan sebagai jaringan tingkah laku manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling ketergantungan (Syani. 2007 : 115).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Organisasi adalah suatu himpunan interaksi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama.
2. Organisasi merupakan suatu wadah dan alat pelaksanaan proses manajemen untuk mencapai tujuan bersama.
3. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka dan organisasi sebagai kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Organisasi adalah tempat kerjasama formal dari sekelompok orang, dalam melakukan tugas-tugasnya.
5. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan, pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.

2.1.3. Konsep Manajemen

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Schein (2008: 2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni man, money, method, machine, market, material dan information.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.1.4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumberdaya manusia (MSDM) menurut Indrastuti (2017:1) bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan Sumberdaya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong sumberdaya manusia untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Disamping itu dapat dikatakan pengertian manajemen sumber daya manusia, adalah suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu yang dimanage oleh profesional SDM

dan Manajer sehingga 5 M dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) perusahaan.

Manajemen mempunyai fungsi yang disebut dengan fungsi – fungsi manajemen berfungsi mengelola 6M yaitu : Man, Machine, Material, Methode, Money, dan Market. Man adalah manusia atau SDM yang berfungsi mengelola 5 M lainnya. Dengan adanya SDM yang mempunyai potensi maka pengelolaan 5M lainnya akan dapat berkembang dengan baik yang dapat menghasilkan kreatifitas dan inovasi dan membuat perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memenangkan persaingan pada pasar global melalui inovasi yang dapat menghasilkan *cost leadership* dan *product differensiasi* yang semakin mengglobal.

Sumber daya manusia yang berpotensi akan memperkuat perusahaan baik sekarang maupun masa depan dengan memunculkan kreatifitas yang menghasilkan dapat menguasai pasar persaingan. Begitu besarnya peran Man dalam mengelola 5 M lainnya maka untuk itu perlu adanya perencanaan dalam mengelola Man (SDM) tersebut dan dibutuhkan analisa – analisa yang tepat dan cepat dalam menghadapi tantangan bisnis dan memenangkannya.

Untuk manage sumberdaya manusia diperlukan berbagai aktifitas departemen SDM dalam mencapai tujuan perusahaan. Aktifitas manage SDM tersebut terangkup dalam beberapa kegiatan yang disebut dengan fungsi – fungsi manajemen sumberdaya manusia. Para ahli mengetengahkan fungsi – fungsi manajemen sumberdaya manusia yang berbeda – beda namun pada prinsipnya tetap

sama yaitu membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dengan mengarahkan assets SDM dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan pergerakan bisnis.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks bisnis, adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. Sumber Daya Manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan, tanpa manusia maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Manajemen Sumber Daya Manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen Sumber Daya Manusia berkaitan dengan kebijakan dan praktek-praktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer, mengenai aspek-aspek Sumber Daya Manusia dari Manajemen Kerja.

Manajemen sumberdaya manusia menurut Wahyudi, (2002: 1), adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, dan memelihara sumberdaya manusia yang kompeten sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisiensi dan ada kepuasan pada diri pribadi – pribadi yang bersangkutan.

Definisi lain menurut Edwin B Flipppo (dalam Wahyudi, 2002: 9) adalah :

“Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pada pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir dimana tujuan – tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat.”

Menurut Fathoni (2006; 10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia. Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Mangkunegara (2011;2) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintergrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan juga sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).

Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain, ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan.

Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Adapun tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati (2008;14), tujuan manajemen sumber daya

manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia.

Menurut Sedarmayanti (2000;6) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarik seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Menurut Sedarmayanti (2009;6) Manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kegiatan sumber daya manusia atau pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia adalah proses penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan, baik individu maupun organisasi yang akan menentukan kerja seorang pegawai.

2.1.5. Konsep Pemerintahan Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa inggris adalah pedanan dari kata government. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara (Nawawi, 2013:18). Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditusaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain antara lain

menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeen schappen*) atau yang bersifat belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

2.1.6. Konsep Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* memandang bahwa agent tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal (Tricker, Opcit, 1984). Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Eisenhardt dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu, asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*).

Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu,

1. Self interest, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri,
2. Bounded-rationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan
3. Risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.

Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu,

1. Konflik sebagai tujuan antar partisipan,
2. Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta
3. Asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli.

Adanya tujuan yang berbeda antara principal dan agent akan menimbulkan masalah keagenan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan

(Abdul Halim dan Syukriy Abullah, 2005). Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Miriam Budiardjo (dalam Loina Lalolo KP, 2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Dalam konteks organisasi sektor publik, senada dengan Miriam Budiardjo, Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Agency

theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat).

Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry.

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

2.1.7. Konsep Akuntabilitas

Tidak hanya perusahaan – perusahaan yang selalu memerlukan pertanggung jawaban atas kegiatan usahanya, lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggung jawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor public juga untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atas dana yang diterima sektor public yang berasal dari masyarakat.

Pemberlakuan Undang – Undang Otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung

jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Yahya, 2011:21).

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul Ulum, 2004). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Mulyana, 2006). Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* (dalam LAN RI dan BPKP, 2001), akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Artinya dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan.

J.B. Ghartey (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Sjahruddin Rasul (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi.

Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Miriam Budiardjo (1998:54) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Senada dengan Miriam Budiardjo, dalam konteks organisasi sektor public. Mardiasmo (2002:43) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengertian Akuntabilitas menurut Ulum (2004:113) adalah sebagai berikut : Akuntabilitas yaitu mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksana kegiatan.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut : Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas sektor public memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena akuntabilitas itu merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemegang amanah (*agent*) yang bertujuan memberikan pertanggung jawaban.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas sektor public memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena akuntabilitas

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002:43) menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) Pertanggung jawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik mempunyai beberapa dimensi. Ellwood (dalam Mardiasmo, 2002:43) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*) Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Loina Laolo Krina P (2003) prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga menurutnya, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan

- b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Menurut *Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability* (dalam LAN RI dan BPKP, 2001) akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya

publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan. Akuntabilitas menurut Tim Studi AKIP, BPKP (2007) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu kebijakan hukum dan bukan hanya suka rela (Ihyaul Ulum, 2004).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2001) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

- a. **Integritas Keuangan.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. **Pengungkapan.** Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.
- c. **Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.** Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.

Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, merujuk pada pembagian akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas yang dimaksud mengerucut pada akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan pemerintah daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2.8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan SKPD yang telah disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat dua bulan setelah akhir tahun anggaran/periode akuntansi berakhir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : “ Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Menurut Bastian (2006:96) pengertian laporan keuangan adalah : “laporan Keuangan sektor public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2002:161) yaitu :

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*).
- b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*).
- d. Kelangsungan organisasi (*viability*)
- e. Hubungan masyarakat (*public relation*).
- f. Sumber fakta dan gambaran (*source of fact and figures*).

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan SKPD terdiri atas tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk menjamin tercapainya akuntabilitas, laporan keuangan SKPD yang disampaikan dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD. Surat pernyataan kepala SKPD berisi pernyataan bahwa laporan keuangan SKPD menjadi tanggung jawabnya dan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD (Haryanto dkk, 2007). LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Haryanto dkk, 2007).

Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008:145).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut : Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan

peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya nilai prediktif laporan laba-rugi dapat ditingkatkan kalau akun-akun penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

b. Andal

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan

untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

- 1) Penyajian jujur Informasi harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Substansi mengungguli bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk menyakinkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
- 3) Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
- 4) Pertimbangan sehat Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal.

- 5) Kelengkapan Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan beban. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansinya.

c. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

d. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2.2.9. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2001) menyebutkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, sasarannya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah

daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas LKPD dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat 1 menyebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satunya adalah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menggambarkan tingkat akuntabilitas LKPD yang secara keseluruhan dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan setahun dua kali (tiap semester). Hasil pemeriksaan keuangan BPK atas LKPD disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK, 2009).

1. Opini Audit

Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Opini Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan.

Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Pengertian SPI menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemda, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Tujuan SPI Pemerintah menurut pasal 2 ayat (3) PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi SPI oleh BPK (BPK, 2008) menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan

penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa. Kelemahan struktur pengendalian intern adalah kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

3. Kepatuhan Terhadap

Peraturan Ketentuan Perundang-Undangan Komponen terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidak ekonomisan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan.

Kerugian negara/daerah atau kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa/daerah uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

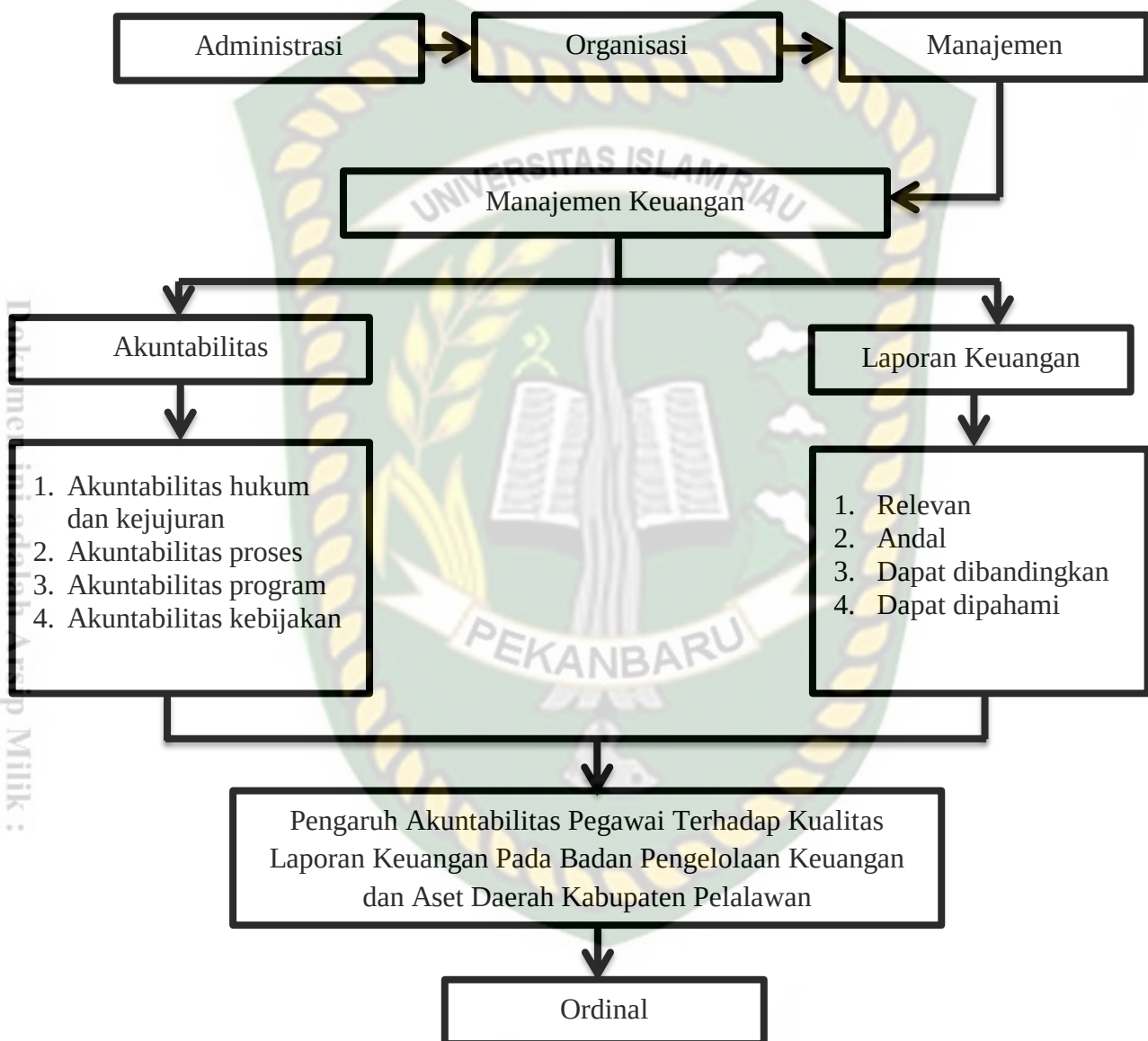
Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome). Temuan ini mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

2.3. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Wahyu Setiawan (2012) Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di	Variabel bebas : Akuntabilitas Laporan Keuangan Variabel terikat : Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah	Akuntabilitas laporan keuangan : 1. Opini audit 2. System pengendalian intern 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan Korupsi : 1. Kualitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan	Persamaan: Mengkaji tentang laporan keuangan pemerintah daerah Perbedaan : pada variable terikat mengkaji masalah korupsi. Indikator

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	Indonesia		mana- 2. jemen sektor publik 3. Hubungan akuntabilitas pemerintah dan masyarakat. 4. Kerangka hukum 5. Trans-paransi dan disemi-nasi informasi	peraturan perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini perlu dikaji ulang karena belum ada penelitian empiris yang sejenis yang mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian ini	penelitian. Dan locus serta metode penelitian yang digunakan.
2	Mahendra Kusuma (2012) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri)	Akuntabilitas (X) Transparansi (Y)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program	Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien determinasi adjusted R ² menunjukkan nilai besar 0.877a . Hasil ini mengindikasikan bahwa 87,70 % variasi tingkat transparansi penyajian laporan keuangan dapat dijelaskan dari variasi akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan	Persamaan penelitian terdapat pada variable X1 yaitu akuntabilitas. Sedangkan perbedaan terdapat pada jumlah variable yang digunakan, indikator, locus penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
				bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi penyajian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi thitung sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 5. Hal ini berarti H_0 ditolak.	
3	Lucy Auditya (2013) Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Jurnal Fairness Vol. 3 No. 1, 2013:21-41)	Akuntabilitas (X1) Transaparansi (X2) Kinerja Pemerintah (Y)	1. Proses pembuatan keputusan 2. Sosialisasi kebijakan 1. Mekanisme keterbukaan 2. Memfasilitas pertanyaan public tentang kebijakan 3. Memfasilitas pelaporan dan penyebaran informasi 1. Kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variable akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi	Persamaan penelitian terdapat pada variable X1 yaitu akuntabilitas. Sedangkan perbedaan terdapat pada jumlah variable yang digunakan, indikator, locus penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
			2. Pencapaian target kinerja dari suatu program 3. Pencapaian efesiensi operasional 4. Ketepatan dan kesesuaian hasil 5. Tingkat pencapaian program 6. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan 7. Moral perilaku pegawai.	Bengkulu, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik.	
4	Athifah, Ai Nur Bayinah dan Efri Syamsul Bahri (2018) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Darul Qur'an Nusantara.	Akuntabilitas (X1)	1. Keputusan harus dibuat secara tertulis 2. Akurasi dan kelengkapan informasi 3. Tujuan kebijakan penjelasan diambil dan dikomunikasikan 4. Kelayakan dan konsistensi 5. Penyebaran informasi mengenai	Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara simultan atau bersama – sama, variable akuntabilitas public dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan karena pertanggung jawaban semakin baik ketika mampu	Persamaan penelitian terdapat pada variable X1 yaitu akuntabilitas. Sedangkan perbedaan terdapat pada jumlah variable yang digunakan, indikator, locus penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	(Jurnal Perisai, Vol 2 (1) April 2018, 54-74).	Transparansi (X2) Kepercayaan (Y)	keputusan. 1. Mekanisme keterbukaan 2. Mekanisme fasilitas public 3. Mekanisme pelaporan 1. Kinerja sesuai dengan harapan nasabah 2. Kepercayaan telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan standar 3. Kepercayaan mampu memberikan pekerjaan yang benar / tidak menyalahi 4. Kepercayaan bahwa pelayanan konsisten 5. Kepercayaan perusahaan bertahan lama.	disampaikan secara terbuka kepada public atau donator yayasan.	
5	Rika Wulandari (2015)	Akuntabilitas (X1)	1. Opini public 2. Kelemahan system pengendalian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian	Persamaan penelitian terdapat pada variable X1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.	Kinerja Keuangan (X2) Tingkat Korupsi (Y)	intern LKPD 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan 1. Rasio kemandirian daerah 2. Aktivitas belanja operasional 3. Aktifitas belanja modal 4. Rasio pertumbuhan	berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Rasio kemandirian memiliki nilai signifikan sebesar 0,021 berada dibawah 0,05 dan kelemahan SPI, kepatuhan peraturan perundang – undangan, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.	yaitu akuntabilitas. Sedangkan perbedaan terdapat pada jumlah variable yang digunakan, indikator, locus penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

Sumber : Jurnal – jurnal penelitian terdahulu, 2021

2.5. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Administrasi adalah proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai saasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan

2. Organisasi adalah suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan.
3. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Manajemen sumberdaya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, dan memelihara sumberdaya manusia yang kompeten sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisiensi dan ada kepuasan pada diri pribadi – pribadi yang bersangkutan.
5. *Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent.
6. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
7. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan

hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

8. Akuntabilitas proses (*process accountability*) Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
9. Akuntabilitas program (*program accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
10. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
11. Laporan keuangan adalah laporan pengelolaan keuangan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
12. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

13. Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
14. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relative.
15. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
16. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD.

2.6. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 : Operasionalisasi Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002:43)	Akuntabilitas	1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	a. Penghindaran penyalahgunaan jabatan b. Kepatuhan terhadap hukum c. Berpedoman pada peraturan dalam penggunaan sumber daya	Ordinal
		2. Akuntabilitas proses	a. Ketersediaan prosedur b. System informasi akuntansi c. System informasi manajemen d. Prosedur administrasi e. Pemberian pelayanan public	Ordinal

1	2	3	4	5
			yang cepat f. Respon- sive g. Murah biaya	
		3. Akuntabilitas program	a. Penca- paian tujuan b. Alterna- tive program lain c. efisiensi	Ordinal
		4. akuntabilitas kebijakan	a. pelaksana- an kebijakan b. hasil dari kebijakan c. tanggung jawab peme- rintah	Ordinal
Laporan keuangan adalah Laporan Keuangan sektor public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik” (Bastian 2006:96).	Laporan Keuangan	1. Relevan	a. Memiliki banyak manfaat b. Timbal balik c. Memiliki manfaat prediktif d. Tepat waktu e. lengkap	Ordinal
		2. Andal	a. Tidak mengandung informasi menyesatkan b. Tidak ada kesalahan material c. Penyajian jujur d. Dapat	Ordinal

1	2	3	4	5
			diverifikasi	
		3. Dapat dibandingkan	a. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya b. Bisa dijadikan pedoman untuk kedepan	Ordinal
		4. Dapat dipahami	a. Penyajian terstandar b. Mengandung pengetahuan yang memadai c. Mudah dimengerti	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

2.7. Skala Pengukuran.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dengan alat ukur, sehingga dapat menghasilkan data kuantitatif. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau sekelompok orang digunakan skala *likert* (Sugiyono, 2007:51). Dengan skala *likert*, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini skala *Likert* yang digunakan untuk Akunyalabilitas pegawai yaitu: Sangat Baik (skor 5), Baik (skor 4), Cukup baik (skor 3), Kurang Baik (skor 2) dan Tidak Baik (skor 1). Untuk kualitas laporan keuangan yaitu :

Sangat baik (skor 5), baik (skor 4), Cukup baik (skor 3), Kurang baik (skor 2) dan Tidak baik (skor 1).

Sebelum menganalisa deskriptif penelitian ini, akan di buat tabel rentang skala yang menjadi acuan dalam analisis deskriptif. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 29 responden dan banyaknya alternative jawaban berjumlah 5 (Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik), maka:

- Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan
- Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Sedangkan untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus:

$$\text{Rentang Skala (interval)} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{alternatif jawaban}}$$

Variabel	Indikator	Skala	Rentang Skor	Kriteria Skor
1	2	3	4	5
Akuntabilitas Pegawai		5	1949,8 – 2320	Sangat Baik
		4	1578,6 – 1948,8	Baik
		3	1207,4 – 1577,6	Cukup Baik
		2	836,2 – 1206,4	Kurang Baik
		1	464 – 835,2	Tidak Baik
	Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	5	366,4 – 435	Sangat Baik
		4	296,8 – 365,4	Baik
		3	227,2 – 295,8	Cukup Baik
		2	157,6 – 226,2	Kurang Baik
		1	87 – 156,6	Tidak Baik
	Akuntabilitas proses	5	853,6 – 1015	Sangat Baik
		4	691,2 – 852,6	Baik
		3	528,8 – 690,2	Cukup Baik
		2	366,4 – 527,8	Kurang Baik
		1	203 – 365,4	Tidak Baik
	Akuntabilitas program	5	366,4 – 435	Sangat Baik
		4	296,8 – 365,4	Baik
		3	227,2 – 295,8	Cukup Baik
		2	157,6 – 226,2	Kurang Baik
		1	87 – 156,6	Tidak Baik
	Akuntabilitas Kebijakan	5	366,4 – 435	Sangat Baik
		4	296,8 – 365,4	Baik
		3	227,2 – 295,8	Cukup Baik
		2	157,6 – 226,2	Kurang Baik

Variabel	Indikator	Skala	Rentang Skor	Kriteria Skor
1	2	3	4	5
		1	87 – 156,6	Tidak Baik
Kualitas Laporan Keuangan		5	1705,2 – 2030	Sangat Baik
		4	1381,4 – 1705,2	Baik
		3	1056,6 – 1380,4	Cukup Baik
		2	731,8 – 1055,6	Kurang Baik
		1	406 – 730,8	Tidak Baik
	Relevan	5	610 – 725	Sangat Baik
		4	494 – 609	Baik
		3	378 – 493	Cukup Baik
		2	262 – 377	Kurang Baik
		1	145 – 261	Tidak Baik
	Andal	5	488,2 – 580	Sangat Baik
		4	395,4 – 487,2	Baik
		3	302,6 – 394,4	Cukup Baik
		2	209,8 – 301,6	Kurang Baik
		1	116 – 208,8	Tidak Baik
	Dapat dibandingkan	5	244,6 – 290	Sangat Baik
		4	198,2 – 243,6	Baik
		3	151,8 – 197,2	Cukup Baik
		2	105,4 – 150,8	Kurang Baik
		1	58 – 104,4	Tidak Baik
	Dapat dipahami	5	366,4 – 435	Sangat Baik
		4	296,8 – 365,4	Baik
		3	227,2 – 295,8	Cukup Baik
		2	157,6 – 226,2	Kurang Baik
		1	87 – 156,6	Tidak Baik

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:8) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan yang mengiring peneliti untuk meneliti Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan adalah belum optimalnya implementasi SAP di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Populasi secara umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 1 orang Kabid Akuntansi dan Keuangan, 1 orang Kabid Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, 1 orang Kabid Perbendaharaan, 1 orang Kasubbid Penatausahaan keuangan, 1 orang Kasubbag Keuangan, 1 orang Kasubbid Informasi Keuangan Daerah, 1 orang Kasubbid pelaksanaan anggaran, dan 27 orang staff Bagian Keuangan di BPKAD Kabupaten Pelalawan.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili dan mencerminkan secara keseluruhan dari populasi yang diteliti. Sampel didefinisikan sebagai sekelompok kecil dari elemen-elemen yang terseleksi dari kelompok target yang lebih besar dan diharapkan dari informasi tersebut dapat dibuat penilaian mengenai kelompok yang lebih besar tersebut. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan keterbatasan melakukan observasi terhadap seluruh populasi, untuk efisiensi waktu dan biaya untuk menghasilkan generalisasi terhadap populasi dan mengurangi kesalahan penelitian dalam pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala BPKAD	1	1	100%
2	Kabid Akuntansi dan Keuangan	1	1	100%
3	Kabid Anggaran dan Informasi Keuangan	1	1	100%
4	Kabid Perbendaharaan	1	1	100%
5	Kasubbid Penatausahaan Keuangan	1	1	100%
6	Kasubbid Informasi Keuangan Daerah	1	1	100%
7	Kasubbid Pelaksanaan Anggaran	1	1	100%
8	Kasubbag Keuangan	1	1	100%
9	Staff Keuangan	27	27	100%
	Jumlah	35	35	-

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel populasi sampel diatas, jumlah pegawai yang dijadikan populasi berjumlah 35 dan sedangkan jumlah sampel sebanyak 35 orang.

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yang ditujukan kepada pimpinan dan Bagian Keuangan BPKAD Kabupaten Pelalawan. Menurut Supriyanto dan Mahfudz, 2010:188) Sampling jenuh (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari responden perseorangan, seperti hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Data ini semua

merupakan data mentah yang diproses untuk menjawab tujuan penelitian.

2. Data sekunder, berupa data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung yang berasal dari berbagai literature serta data yang didapat melalui survey ke instansi terkait. Diantaranya tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informative jika digunakan oleh pihak lain.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan tertulis tentang pengaruh akuntabilitas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan, yang diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam variabel penelitian.
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan untuk mengetahui dan melihat langsung akuntabilitas pegawai terhadap laporan keuangan.
3. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146).

3.7. Teknik Analisa Data

Dalam kaitannya dengan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan dan untuk mempermudah pengolahan data pada penelitian ini digunakan analisis data.

3.7.1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Hasil penelitian disebut valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian disini menggunakan rumus korelasi produk moment (Arikunto, 2002:17)

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah sampel

X = Nilai dari variabel independen

Y = Nilai dari variabel dependen

Bila $r_{hitung} > r_{table}$ maka pengujian indikator valid. Sebaliknya bila $r_{hitung} < r_{table}$ maka pengujian indikator tidak valid. Apabila koefisien korelasi semua butir pertanyaan dengan skor total diatas atau lebih besar dari 0,3 maka instrumen dinyatakan valid (Sugiyono 2010 : 153).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari instrument untuk mengukur variabel (Sugiyono, 2010). Nilai batas yang diperkenankan untuk menilai atau menguji apakah setiap variable dapat dipercaya, handal dan akurat dipergunakan formula *alpha cronbach*. Suatu kuisisioner dikatakan handal jika jawaban responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Arikunto (1998) instrument dinyatakan reliable apabila nilai *alpha*

$cronbach \geq 0,60$, jika $alphacronbach < 0,60$ maka dikatakan tidak reliabel.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi variabel-variabel mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pada distribusi normal kurva akan menyerupai *bell-sharpedcurve* yang kedua sisinya melebar tak terhingga, tetapi juga tidak berpotongan dengan sumbu horisontal. Uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram, apabila data menyebar disekitar garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi kriteria dan sesuai dengan asumsi normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut tidak memenuhi normalitas (Santoso, 2002).

3.8. Pengujian Hipotesis

3.8.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk menganalisa pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun bersama-sama (simultan) serta untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Analisis regresi linier sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan :

- Y : Kualitas laporan keuangan
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- x : Akuntabilitas Pegawai
- e : error

3.8.2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dimensi variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial dapat mempengaruhi variabel terikat. Analisa dilakukan dengan membandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada tabel *analysis of variance*.

Hipotesis :

$H_o : \beta_i = 0$ Berarti dimensi variabel bebas X_i tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y

$H_a : \beta_i \neq 0$ Berarti dimensi variabel bebas X_i mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Y

Kriteria :

H_o diterima dan H_a ditolak jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$

H_o ditolak dan H_a diterima jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga – lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat Kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945.

Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan

Kuala Kampar. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu dan pulau – pulau kecil lainnya. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administrative terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Adapun luas wilayah kabupaten Pelalawan menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan, 2019

No	Kecamatan	Luas (Ha)			% Wilayah
		Daratan	Perairan	Total	
1	Langgam	142.396,15	1.848,94	144.245,09	10,36
2	Pangkalan Kerinci	18.716,16	639,37	19.355,53	1,39
3	Bandar Sei Kijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29
4	Pangkalan Kuras	117.746,75	642,04	118.388,79	8,50
5	Ukui	129.268,77	687,29	129.956,06	9,33
6	Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63
7	Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93
8	Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76
9	Bandar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68
10	Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79
11	Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89
12	Teluk Meranti	391.140,47	32.843,94	423.984,41	30,45
	Jumlah	1.282.181,47	110.312,82	1.392.494,29	100,00

Sumber : Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Teluk Meranti yaitu dengan total 423.984,41Ha sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu dengan luas 19.355,53 Ha.

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2017 adalah 438.788 jiwa. Terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 225.234 jiwa dan perempuan 213.554 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Mengenai jumlah penduduk bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 2019

No	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
	Langgam	16.495	15.476	31.971	107
	Pangkalan Kerinci	63.790	61.184	124.974	104
	Bandar Sei Kijang	19.263	17.970	37.233	107
	Pangkalan Kuras	31.284	29.771	61.055	105
	Ukui	21.107	19.151	40.258	110
	Pangkalan Lesung	16.854	15.728	32.582	107
	Bunut	8.031	7.898	15.929	102
	Pelalawan	10.541	9.624	20.165	110
	Bandar Petalangan	7.202	7.166	14.368	101
	Kuala Kampar	9.236	8.890	18.126	104
	Kerumutan	12.522	12.024	24.546	104
	Teluk Meranti	8.909	8.672	17.581	103
	Jumlah	225.234	213.554	438.788	105

Sumber : Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2020

Dari tabel IV.2 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan. Jumlah penduduk yang paling banyak yaitu pada kecamatan Pangkalan Kerinci yang berjumlah 124.974 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang jumlahnya paling sedikit yaitu pada kecamatan Bandar Petalangan yaitu berjumlah 14.368 jiwa.

4.2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwasanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah memiliki kewajiban meliputi :

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

BPKAD Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dalam perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu : Peraturan

Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan BPKAD Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. BPKAD Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

- b. BPKAD Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

BPKAD Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

3. Fungsi

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi BPKAD tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) BPKAD yang memuat program kerja operasional sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penjabaran Program kerja operasional dalam bentuk kegiatan yang disusun secara tahunan

dimuat dalam Rencana Kerja (RENJA) BPKAD. Renja tersebut juga menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat dijelaskan susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan berikut ini :

Kepala Badan; membawahi Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu :

1. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah;
2. Bidang Perbendaharaan;
3. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan;
4. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah
5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding
6. Bidang Aset;

A. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan perencanaan serta evaluasi pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian. dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program

Subbagian program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka persiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Bagian Program;

- b. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan Badan;
- c. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi program kegiatan;
- e. pengkoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, dan Laporan Kinerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang Program yang diberikan oleh atasan

2. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan. Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka persiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana anggaran Badan;
- c. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;
- d. Pelaksanaan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- e. pengadministrasian penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak
- f. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Badan;
- d. Pelaksanaan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepastakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
- e. Pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan kerja Badan;
- f. penyimpanan, pendistribusian dan pengelolaan aset Badan;
- g. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf di lingkungan Badan;
- h. Penyiapan perlengkapan rapat dan pelayanan tamu;
- i. Penghimpunan, penelahaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- j. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- k. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- l. Penyiapan dan pengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

- m. Penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

B. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah

Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, memfasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD, melakukan pembinaan dan evaluasi rancangan anggaran kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan bidang anggaran dan informasi keuangan daerah;
- b. Penyusunan kebijakan dan pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- c. Pelaksanaan koordinasi rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- e. Pelaksanaan fasilitasi tugas APBD;
- f. Pelaksanaan fasilitasi evaluasi APBD dan rancangan perubahan APBD;

- g. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa bud, meliputi manajemen anggaran kas, penerbitan rancangan surat penyediaan dana (SPD) dan penatausahaan data rekonsiliasi penggajian pegawai dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
- h. Pelaksanaan koordinasi pendapatan khusus dana transfer;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sistem informasi keuangan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain dibidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah yang diberikan oleh atasan.

Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah membawahi 3 Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer

Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada sub Bidang Penyusunan anggaran dan Dana Transfer. Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan program Penyusunan anggaran dan Dana Transfer;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Penyusunan anggaran dan Dana Transfer;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Penyusunan anggaran dan Dana Transfer;
- d. Penyiapan dan fasilitasi tugas TAPD;

- e. Penyiapan dan fasilitasi evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pendapatan khusus dana transfer; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.

Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub bidang Pelaksanaan Anggaran. Sub bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program Pelaksanaan Anggaran;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pelaksanaan Anggaran;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD, meliputi manajemen anggaran kas dan penerbitan rancangan surat penyediaan dana (SPD);
 - e. Penyiapan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah

Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Informasi Keuangan Daerah. Subbidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan program Informasi Keuangan Daerah;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Informasi Keuangan Daerah;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Informasi Keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan informasi keuangan daerah;
- f. Penyiapan perencanaan pelaksanaan pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, piranti lunak dan piranti penunjang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD, meliputi penatausahaan data rekonsiliasi penggajian pegawai dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP); dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

C. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Penerimaan, Pengeluaran, Verifikasi, Pelaporan dan Belanja PPKD. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. Pelaksanaan penataan administrasi pengeluaran anggaran;

- e. Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;
- f. Menyelenggarakan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil (DBH);
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah yang diberikan oleh Kepala Badan;

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran

Sub Bidang Penerimaan Dan Pengeluaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penerimaan dan Pengeluaran. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai fungsi :

Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
- b. pelaksanaan pembayaran gaji;
- c. pelaksanaan pengujian SPM belanja;
- d. pemrosesan penerbitan SP2D belanja;
- e. pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran dana APBD / APBDP;
- f. pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS, Tabungan Perumahan (Taperum), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

- g. Penyimpanan uang daerah atas nama Kas Umum Daerah;
- h. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan Investasi daerah;
- i. melakukan koordinasi Dana Bagi Hasil (DBH);
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan

Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan. Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana kerja Sub bidang penerimaan dan pengeluaran;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Verifikasi dan Pelaporan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan Verifikasi dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran dari kas daerah;
- e. pelaksanaan penatausahaan dokumen SP2D belanja;
- f. menyiapkan dan membuat laporan BUD;
- g. memverifikasi dan mengesahkan pendapatan dan belanja BLUD;
- h. penyiapan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Sub Bidang Belanja PPKD

Sub Bidang Belanja PPKD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Belanja PPKD. Sub bidang Belanja PPKD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana kerja Sub bidang penerimaan dan pengeluaran;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Belanja PPKD;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan di subbidang Belanja PPKD;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja PPKD;
- e. Penyiapan bahan penerbitan SPM pencairan dana Belanja PPKD;
- f. Pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja PPKD;
- g. Pelaksanaan penatausahaan dokumen SP2D belanja PPKD;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Pembukuan dan Bina Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang akuntansi dan bina keuangan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan bina keuangan;

- c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai sap;
- e. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan opd dan blud;
- f. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- g. Penyiapan dokumen evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan apbd;
- h. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas;
- i. Penyusunan laporan realisasi apbd bulanan, triwulanan dan semesteran;
- j. Pelaksanaan tugas lain dibidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah yang diberikan oleh kepala badan;

Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan

Sub Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penatausahaan Keuangan. Sub bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program penatausahaan keuangan;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi penatausahaan keuangan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai sap;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2. Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan

Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan. Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program Akuntansi dan Pembukuan;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Akuntansi dan Pembukuan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Akuntansi dan Pembukuan;
- d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Penyiapan dokumen evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran;
- g. Penyiapan konsolidasi laporan keuangan OPD dan BLUD; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Sub Bidang Bina Keuangan

Sub Bidang Bina Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Bina Keuangan. Sub bidang Bina Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program Bina Keuangan;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bina Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Bina Keuangan;

- d. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pendataan, Pengawasan, Verifikasi, Penetapan, Pelayanan dan Pelaporan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengkoordinasian pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan pajak daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pengawasan

Sub Bidang Pendataan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Pendataan dan Pengawasan. Sub Bidang Pendataan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program pendataan dan pengawasan pajak daerah;
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan dan pengawasan pajak daerah;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi pendataan dan pengawasan pajak daerah;
 - d. Melakukan pendataan, evaluasi dan pengawasan terhadap pajak daerah; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
 3. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan. Sub bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program verifikasi dan penetapan pajak daerah;
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis verifikasi dan penetapan pajak daerah;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi verifikasi dan penetapan pajak daerah;
 - d. Pelaksanaan survey ,verifikasi, penilaian dan penetapan subjek dan objek pajak daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
4. Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan PAD

Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan PAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pelayanan dan Pelaporan PAD. Sub bidang Pelayanan dan Pelaporan PAD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program Pelayanan dan pelaporan PAD;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pelayanan dan pelaporan PAD;
- c. penyiapan bahan sosialisasi, pembinaan dan melakukan koordinasi Pelayanan dan penyiapan pelaporan PAD;
- d. penyajian informasi data objek dan subjek pajak daerah
- e. Penyiapan penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- f. penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak daerah;
- g. Penyiapan sistem informasi pengolahan data pajak daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

F. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding

Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penagihan, keberatan dan banding atas pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas :

Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penagihan, keberatan dan banding pajak daerah

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penagihan, keberatan dan banding pajak daerah.

- b. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi serta pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan, keberatan dan banding pajak daerah.
- c. Pelaksanaan penyisihan piutang dan penyelesaian administrasi piutang
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penagihan, piutang, pengurangan/ keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang penagihan, keberatan dan banding yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Sub bidang penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTM. Sub bidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja sub bidang penagihan PBB dan BPHTB
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang PBB dan BPHTB
- c. Pelaksanaan penagihan pajak PBB dan BPHTB
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan piutang pajak PBB dan BPHTB
- e. Pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan PBB dan BPHTB
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub bidang penagihan pajak daerah lainnya

Sub bidang penagihan pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang penagihan pajak daerah lainnya. Sub bidang penagihan pajak daerah lainnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang penagihan pajak daerah lainnya.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang penagihan pajak daerah lainnya.
- c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah lainnya.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan piutang pajak daerah lainnya.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan pajak daerah lainnya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Sub bidang Penyelesaian Piutang, Keberatan dan Banding

Sub bidang penyelesaian piutang, keberatan dan banding mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penyelesaian Piutang, keberatan dan banding. Sub bidang penyelesaian piutang, keberatan dan banding mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang piutang, keberatan dan banding
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang piutang, keberatan dan banding.
- c. Pelaksanaan penagihan dan penyelesaian piutang, keberatan dan banding

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan piutang, keberatan dan banding
- e. Pengumpul dan pengolahan data hasil penagihan piutang, keberatan dan banding.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

G. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan perencanaan program pengendalian dan pemberdayaan aset / BMD (Barang Milik Daerah). Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemberdayaan aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan aset/BMD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dan pemberdayaan aset yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Aset membawahi 3 (tiga) Sub bidang yang meliputi:

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Perencanaan Kebutuhan

dan Pemanfaatan Aset. Sub bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset/BMD;
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset/BMD;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi dan melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset/BMD;
 - d. Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ);
 - e. Pelaksanaan verifikasi penyerahan hasil pengadaan aset/BMD;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset/BMD; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset

Sub Bidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset. Sub bidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan program kegiatan inventarisasi, penatausahaan dan pelaporan aset/BMD;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis inventarisasi, penatausahaan dan pelaporan aset/BMD
- c. Penyiapan bahan fasilitasi penatausahaan dan pelaporan aset/BMD;

- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan aset/BMD;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, konsolidasi dan pengkoordinasian administrasi penatausahaan dan pelaporan aset/BMD;
 - f. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pelaporan aset/BMD; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
3. Sub Bidang Penilaian, Pengamanan dan Penghapusan Aset.

Sub Bidang Penilaian, Pengamanan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Penilaian, Pengamanan dan Penghapusan Aset. Sub Bidang Penilaian, Pengamanan dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan program kegiatan penilaian, pengamanan dan penghapusan aset/BMD;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penilaian, pengamanan dan penghapusan aset/BMD
- c. Penyiapan bahan fasilitasi penilaian, pengamanan dan penghapusan aset/BMD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, penyimpanan dan pengamanan surat berharga/dokumen kepemilikan aset/BMD;
- e. Pelaksanaan verifikasi usulan penghapusan aset/BMD;
- f. Pelaksanaan fasilitasi, konsolidasi dan pengkoordinasian penilaian, pengamanan dan penghapusan aset/BMD; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah Kepala BPKAD, Kabid, Kasubbid dan Staf di BKPAD Kabupaten Pelalawan. Dengan penyebaran kuisisioner sebanyak 35 responden dengan menggunakan teknik sensus bagi responden pada bagian keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan dan Kepala BPKAD dijadikan key informan dalam penelitian ini. Karakteristik penelitian terdiri dari :

1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – laki	16	46
2	Perempuan	19	54
		35	100

Sumber : Kuisisioner (identitas responden)

Berdasarkan tabel V.1 diketahui bahwa mayoritas responden penelitian adalah didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki – laki yakni sebanyak 16 orang atau sebesar 46%. Sementara responden lebih mendominasi yaitu berjumlah 19 atau 54%.

2. Karakteristik Responden Menurut Umur

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	< 30	2	6
2	31 – 40	20	57
3	41 – 50	9	26
4	≥ 50	4	11
	Jumlah	35	100

Sumber : Kuisisioner (identitas responden)

Berdasarkan tabel V.2 diatas, diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden yang berusia 31-30 tahun dengan jumlah 20 orang atau sebanyak 57%. Urutan kedua ditempati oleh responden dengan usia 41 – 50 tahun dengan jumlah 9 orang atau sebanyak 26%. Urutan ketiga ditempati oleh responden dengan usia dibawah 30 tahun yang berjumlah 2 orang atau 6%, sedangkan yang berumur diatas 50 tahun berjumlah 4 orang atau 11%.

3. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA / SMK	4	11
2	D3	5	14
3	S1	23	66
4	S2	3	9
	Jumlah	35	100

Sumber : Kuisisioner (Identitas Responden)

Berdasarkan tabel V.3 diatas, diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 23 orang atau sebesar 66%. Urutan kedua ditempati oleh responden dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat yang berjumlah 4 orang dengan persentase 11%. Sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan D3 berjumlah 5 orang atau sebesar 14% dan S2 berjumlah 3 orang dengan persentase 9%.

5.2. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Uji validitas instrument Akuntabilitas Pegawai (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan menggunakan teknik koefisien korelasi antara skor butir soal atau pertanyaan dengan skor total melalui uji dengan membandingkan nilai Corrected item – total Correlation (rhitung) masing – masing item pertanyaan kuesioner dengan nilai rtabel (0,05;n/2). Jika hasil rhitung lebih besar dari rtabel, maka item pertanyaan valid. Untuk lebih jelas tentang hasil uji validitas variabel Akuntabilitas Pegawai dapat dilihat pada tabel V.4 berikut :

Tabel V.4 Uji Validitas (X) Akuntabilitas Pegawai

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sign	Kriteria
1	Pertanyaan 1	0,531	0,456	0,005	Valid
2	Pertanyaan 2	0,618	0,456	0,005	Valid
3	Pertanyaan 3	0,598	0,456	0,005	Valid
4	Pertanyaan 4	0,469	0,456	0,005	Valid
5	Pertanyaan 5	0,720	0,456	0,005	Valid
6	Pertanyaan 6	0,646	0,456	0,005	Valid
7	Pertanyaan 7	0,617	0,456	0,005	Valid
8	Pertanyaan 8	0,703	0,456	0,005	Valid
9	Pertanyaan 9	0,758	0,456	0,005	Valid
10	Pertanyaan 10	0,500	0,456	0,005	Valid
11	Pertanyaan 11	0,665	0,456	0,005	Valid
12	Pertanyaan 12	0,542	0,456	0,005	Valid
13	Pertanyaan 13	0,652	0,456	0,005	Valid
14	Pertanyaan 14	0,697	0,456	0,005	Valid
15	Pertanyaan 15	0,777	0,456	0,005	Valid
16	Pertanyaan 16	1,000	0,456	0,005	Valid

Sumber : Data hasil Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel V.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Akuntabilitas Pegawai memiliki status valid, karena nilai rhitung (*Corrected item – total correlation*) lebih besar dari rtabel sebesar 0,456.

Tabel V.5 Uji Validitas (Y) Kualitas Laporan Keuangan.

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sign	Keterangan
1	Pertanyaan 1	0,718	0,456	0,005	Valid
2	Pertanyaan 2	0,617	0,456	0,005	Valid
3	Pertanyaan 3	0,750	0,456	0,005	Valid
4	Pertanyaan 4	0,646	0,456	0,005	Valid
5	Pertanyaan 5	0,698	0,456	0,005	Valid
6	Pertanyaan 6	0,733	0,456	0,005	Valid
7	Pertanyaan 7	0,683	0,456	0,005	Valid
8	Pertanyaan 8	0,577	0,456	0,005	Valid
9	Pertanyaan 9	0,564	0,456	0,005	Valid
10	Pertanyaan 10	0,610	0,456	0,005	Valid
11	Pertanyaan 11	0,638	0,456	0,005	Valid
12	Pertanyaan 12	0,675	0,456	0,005	Valid
13	Pertanyaan 13	0,739	0,456	0,005	Valid
14	Pertanyaan 14	0,744	0,456	0,005	Valid

Sumber : Sumber : Data hasil Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel V.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki status valid, karena nilai rhitung (*Corrected item – total correlation*) lebih besar dari rtabel sebesar 0,456.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir – butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun reliabilitas untuk masing – masing variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel V.6 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	N of Pertanyaan	Crobach's Alpha	Syarat minimal	Keterangan
1	Akuntabilitas Pegawai	16	0,903	0,6	Reliabel
2	Kualitas Laporan Keuangan	14	0,897	0,6	Reliabel

Sumber : Data hasil Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel V.6 diketahui bahwa uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument Akuntabilitas Pegawai adalah sebesar 0,903, instrument Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,897 dari data tersebut terlihat bahwa nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6, yang berarti bahwa kedua instrument dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan.

5.3. Analisis Data Tentang Akuntabilitas Pegawai (X)

Akuntabilitas merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan

mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2002:9).

Kepemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Akuntabilitas pada hakekatnya merupakan salah satu key factor dalam menjawab segala tuntutan terhadap kinerja pemerintahan. Akuntabilitas yang menjunjung tinggi prinsip *equitable* dan *responsivness to people's needs* merupakan *resultante* dari proses dan prinsip-prinsip *good governance* (efektivitas, efisiensi dan tranparansi), serta tuntutan globalisasi yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi dan kompetisi. Dalam konteks globalisasi inilah *good governance* telah menjadi parameter pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Dalam konteks ini pula, aparatur pemerintah sebagai aktor dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan semakin dituntut untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Kinerja aparatur yang semula berstandar pada prinsip *responsibility* (tanggungjawab) dan *obligation*

(kewajiban), kini harus pula perpatokan pada apa yang disebut sebagai *accountability*.

Dengan demikian, upaya merumuskan standar akuntabilitas kompetensi pegawai diartikan sebagai perumusan norma yang dijadikan tolok ukur kemampuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, standar akuntabilitas kompetensi tersebut harus dipandang pula dalam kerangka evaluasi kinerja, yang memerlukan instrumen pengukuran dan prosedur pelaksanaannya.

Dalam mengukur Variabel Penelitian Akuntabilitas Pegawai terdapat empat indikator yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada Pegawai Bagian Keuangan di BPKAD Kabupaten Pelalawan, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum adalah sebagai berikut :

Tabel V.7 Tanggapan responden tentang Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Penghindaran penyalahgunaan jabatan	85	40	6	0	0	131
2	Kepatuhan terhadap hukum	80	52	0	0	0	132
3	Berpedooman pada peraturan dalam penggunaan sumber daya	60	52	9	2	0	123
	Total tanggapan	225	144	15	2	0	386
Rentang skor							366,4 – 435
Kategori							Sangat Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 386 total jawaban tentang Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, sebanyak 225 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 144 total tanggapan responden berada pada skala baik. Pada kategori cukup baik berjumlah 15 dari total skor responden dan pada kategori kurang baik terdapat 2 dari total skor responden. Berdasarkan tabel tersebut indikator akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berada pada kategori sangat baik. Keadaan ini menunjukkan bahwa pegawai sudah menjalankan tugas dalam mengelola keuangan berdasarkan ketentuan aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa : *“Selama ini kami menilai baik kejujuran dan kinerja pegawai BPKAD, hal ini dilihat dari pelaksanaan tugas yang sudah dapat*

diselesaikan dengan baik dan diwaktu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas sudah cukup bagus, ditandai dengan pegawai mampi menyelesaikan pekerjaan yang ada. Namun dalam hal ini juga perlu ditingkatkan lagi dikarenakan dalam proses penyelesaian pekerjaan masih melibatkan campur tangan dari pihak lain, dalam artian belum bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sendiri dan masih membutuhkan orang lain, hal ini yang menyebabkan dalam penyelesaian tugas tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan". (Wawancara dengan Kepala BPKAD, Senin 18 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPKAD diketahui bahwa pegawai BKAD sudah menjalankan tugas dengan baik dan menerapkan prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Namun dari segi keterampilan kerja masih perlu ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan dikarenakan masih banyak pegawai yang dalam proses menyelesaikan kerjanya masih membutuhkan bantuan dari tenaga honorer untuk menyelesaikan tugasnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhaendra Kusuma tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri) yang menyatakan bahwa Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mahasiswa akuntansi politeknik yang dalam kurikulum prodi nya terdapat mata kuliah akuntansi sector public dengan beban 3

(tiga) sks memberikan persepsi yang baik terhadap pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mahasiswa menganggap, transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan berwibawa dalam arti professional.

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya misalokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas

proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), atukah dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada bagian keuangan, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator akuntabilitas proses yaitu sebagai berikut.

Tabel V.8 Tanggapan responden tentang Akuntabilitas Proses

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan prosedur	65	48	8	0	0	121
2	System informasi akuntansi	80	32	15	0	0	127
3	System informasi manajemen	80	36	12	0	0	128
4	Prosedur administrasi	65	40	15	2	0	122

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pemberian pelayanan public yg cepat	70	40	15	0	0	125
6	Responsive	65	48	12	0	0	125
7	Biaya murah	55	52	15	0	0	122
	Jumlah	480	296	92	2	0	870
Rentang skor							853,6 – 1015
Kategori							Sangat Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 870 total jawaban tentang akuntabilitas proses, sebanyak 480 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 296 total tanggapan responden pada skala baik, pada skala cukup baik terdapat 92 dari total skor responden dan pada kategori tidak baik berjumlah 2 dari total skor responden. Keadaan ini menunjukkan dari pemberian akuntabilitas proses dalam pembuatan laporan keuangan memang sudah diterapkan dengan baik, namun meskipun begitu juga perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa “*Dalam proses pencapaian tujuan organisasi memang membutuhkan anggaran yang besar baik itu untuk sarana dan prasarana maupun kebutuhan pegawainya, namun setiap anggaran yang diberikan sudah jelas pagu anggarannya sehingga kami hanya bisa menjalankan sesuai dengan ketentuan yang diberikan pemerintah pusat. Sebagian besar pegawai sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, dengan kuantitas pekerjaan yang*

begitu banyak, kinerja pegawai pengelola keuangan tentu begitu tinggi dari SKPD lain karena mengatur anggaran dan belanja di Kabupaten ini dan dapat terealisasi dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik, terlihat dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017 sampai sekarang ini. (Hasil Wawancara dengan Kepala BPKAD 18 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa pihaknya sudah menjalankan tugas dengan baik terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhaendra Kusuma tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri) yang menyatakan bahwa Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mahasiswa akuntansi politeknik yang dalam kurikulum prodi nya terdapat mata kuliah akuntansi sector public dengan beban 3 (tiga) sks memberikan persepsi yang baik terhadap pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mahasiswa menganggap, transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan

kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan berwibawa dalam arti professional.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai bagian keuangan, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator akuntabilitas program.

Tabel V.9 Tanggapan responden tentang Akuntabilitas Program

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pencapaian Tujuan	50	44	21	2	0	117
2	Alternative program lain	45	48	21	2	0	116
3	Efisiensi	50	64	9	0	0	123
	Total tanggapan	145	156	51	4	0	356
Rentang skor							296,8 – 365,4
Kategori							Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 356 total jawaban tentang akuntabilitas program, sebanyak 145 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 156 total tanggapan responden pada skala baik, 51 total berada pada kategori cukup baik dan 4 total jawaban responden berada pada kategori kurang

baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan setiap program yang sudah diberikan pemerintah, pegawai pengelola keuangan sudah bertanggung jawab dengan baik untuk menjalankannya.

Hasil penelitian diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa : *“Pada dasarnya semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana dengan baik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2017 BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah mendapat opini WTP oleh BPK Republik Indonesia hal ini menandakan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sudah cukup bagus, ditandai dengan pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada. Namun dalam hal ini juga perlu ditingkatkan lagi dikarenakan dalam proses penyelesaian pekerjaan masih melibatkan campur tangan dari pihak lain, dalam artian belum bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sendiri dan masih membutuhkan orang lain, hal ini yang menyebabkan dalam penyelesaian tugas tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan”.* (Wawancara dengan Kepala BPKAD, Senin 18 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa sebagian besar program kegiatan sudah terlaksana dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK RI dari tahun 2017 sampai saat ini yang menandakan bahwa keterampilan pegawai dalam menjalankan program pemerintah pusat sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marhaendra Kusuma tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, karena masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalanannya pemerintahan. Tingkat kepercayaan akan melahirkan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai pengelola keuangan daerah, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator akuntabilitas kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel V.10 Tanggapan responden masyarakat tentang Akuntabilitas Kebijakan

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan kebijakan	40	60	18	0	0	118
2	Hasil dari kebijakan	60	32	27	0	0	119
3	Tanggung jawab pemerintah	55	48	16	0	0	119
	Total Tanggapan	155	140	61	0	0	356
Rentang Skor							296,8 – 365,4
Kategori							Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 356 total jawaban tentang akuntabilitas kebijakan, sebanyak 155 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 140 total tanggapan responden berada pada skala baik, dan 61 total tanggapan responden berada pada skala cukup baik. Dengan rentang skor 296,8 – 365,4 masuk dalam kategori baik. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam pengelolaan keuangan sudah ada dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh bagian pengelola keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa *“Dalam pengelolaan keuangan daerah, kami selalu mengacu dan berpedoman pada aturan – aturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan dalam menyusun laporan keuangan juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur oleh Peraturan*

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah guna menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas". (Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 18 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, kami selalu mengacu dan berpedoman pada aturan – aturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan dalam menyusun laporan keuangan juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah guna menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhaendra Kusuma tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri) yang menyatakan bahwa transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi juga merupakan salah satu cara

untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya misalokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi.

Adapun kebijakan utama yang melatar belakangi pengelolaan keuangan diberikan kepada daerah adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri, karena semua peraturan dan harapan masyarakat adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan serta menjunjung tinggi akuntabilitas publik, meskipun sekarang kita merasakan masih sangat sulit untuk menuntut pemerintahan daerah memberikan informasi secara luas terkait pertanggungjawaban laporan keuangannya, hal itu terbukti dengan masih adanya praktek korupsi yang menjerat pejabat wajar jika terdapat pernyataan ketidakpuasan dari masyarakat luas terkait kepemimpinan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya berorientasi pada pemerintah daerah.

Sementara dibawah ini dijelaskan tabel rekapitulasi variable penelitian akuntabilitas berdasarkan tanggapan responden pada bagian pengelolaan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan.

Tabel V.11 Rekapitulasi tanggapan responden tentang Akuntabilitas Pegawai

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Skor
			SB	B	CB	KB	TB	
1	Akuntabilitas Pegawai	Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	255	144	15	2	0	386
2		Akuntabilitas proses	480	296	92	2	0	870
3		Akuntabilitas program	145	156	51	4	0	356
4		Akuntabilitas kebijakan	155	140	61	0	0	356
Total tanggapan			1035	736	219	8	0	1998
Rentang skor			1949,8 – 2320					
Kategori			Sangat Baik					

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang akuntabilitas pegawai dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 16 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat total 1998 total jawaban tentang variabel akuntabilitas pegawai, sebanyak 1035 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 736 total tanggapan atau responden berada pada skala baik, 219 total tanggapan responden berada pada skala kategori cukup baik dan 8 total responden menjawab kurang baik. Dengan rentang skor 1949,8 – 2320 masuk dalam kategori sangat baik.

Hasil rekapitulasi penelitian diperkuat dengan hasil wawancara kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa *“Sebagian besar pegawai sudah mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan kuantitas pekerjaan yang begitu banyak, kinerja pegawai pengelola keuangan tentu begitu tinggi dari SKPD lain karena mengatur anggaran dan belanja di Kabupaten ini dan dapat terealisasi dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik, terlihat dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017 sampai sekarang ini”*. (Wawancara dengan Kepala BPKAD, Senin 18 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPKAD diketahui bahwa Sebagian besar pegawai sudah mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan kuantitas pekerjaan yang begitu banyak, kinerja pegawai pengelola keuangan tentu begitu tinggi dari SKPD lain karena mengatur anggaran dan belanja di Kabupaten ini dan dapat terealisasi dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik, terlihat dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017 sampai sekarang ini.

5.4. Analisis Data Tentang Laporan Keuangan (Y)

Dalam mengukur kualitas laporan keuangan terdapat empat indikator yaitu sebagai berikut :

1. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan halhal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya nilai prediktif laporan laba-rugi dapat ditingkatkan kalau akun-akun penghasilan atau badan yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada bagian keuangan, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Relevan.

Tabel V.12 Tanggapan responden tentang indikator Relevan

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Memiliki banyak manfaat	60	56	9	0	0	125
2	Timbal balik	55	64	6	0	0	125
3	Memiliki manfaat prediktif	55	60	9	0	0	124
4	Tepat waktu	75	52	3	0	0	130
5	Lengkap	85	44	3	0	0	132
Total tanggapan		330	276	30	0	0	636
Rentang skor						610 – 725	
Kategori						Sangat Baik	

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 636 total jawaban tentang indikator relevan, sebanyak 330 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 276 total tanggapan responden pada skala baik, sebanyak total 30 total responden menjawab cukup baik.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa “*Laporan keuangan merupakan dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja suatu instansi, jadi hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai laporan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu dalam menyusun laporan keuangan harus bersumber dari sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan serta dalam proses*

pengumpulannya harus tepat pada waktu yang ditentukan dan sesuai dengan yang diharapkan". (Wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 18 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yakni memiliki manfaat, umpan balik memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas pemerintah Buton. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan maka akan semakin menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintahan. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja dapat diukur dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Andal

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan

atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

- 1) Penyajian jujur Informasi harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Substansi mengungguli bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk meyakinkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
- 3) Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- 4) Pertimbangan sehat Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal. Kelengkapan Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan beban. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansinya.

Tabel V.13 Tanggapan responden dalam indikator Andal

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Tidak mengandung informasi menyesatkan	80	44	6	0	0	130
2	Tidak ada kesalahan material	80	44	6	0	0	130
3	Penyajian jujur	65	48	12	0	0	125
4	Dapat diverifikasi	45	76	3	0	0	124
Total tanggapan		270	212	27	0	0	509
Rentang skor						488,2 – 580	
Kategori						Sangat Baik	

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 509 total jawaban tentang indikator andal dalam kualitas laporan keuangan, sebanyak 270 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 212 total tanggapan responden pada skala baik, sebanyak total 27 total responden menjawab cukup baik.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai pengelola keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator andal adalah sebagai berikut : *“Laporan keuangan yang baik harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan karena laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah agar*

lebih baik kedepannya". (Wawancara Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 18 Januari 2021).

Berdasarkan tanggapan dari Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban utama pemerintah kepada masyarakat umum juga parlemen harus memberikan informasi yang jelas sebagai bentuk representasi dari kinerja yang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Artinya bahwa baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam membuat laporan tanggung jawab keuangan berisikan informasi dari laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut mempunyai potensi menyesatkan. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut : Penyajian jujur, Dapat diverifikasi, Netral.

3. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai bagian keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator laporan keuangan dapat dibandingkan.

Tabel V.14 Tanggapan responden tentang indikator dapat dibandingkan

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	45	52	21	0	0	118
2	Bisa dijadikan pedoman untuk kedepan	55	64	6	0	0	125
Total tanggapan		100	116	27	0	0	243
Rentang skor							198,2 – 243,6
Kategori							Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 243 total jawaban tentang indikator kualitas laporan keuangan dapat dibandingkan berapada pada kategori baik

dengan uraian sebagai berikut, sebanyak 100 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 116 total tanggapan responden pada skala baik, sebanyak 27 total responden menjawab cukup baik.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai pengelola keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator andal adalah sebagai berikut : *“Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika laporan keuangan tersebut mendapatkan opini selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari laporan keuangan masih belum maksimal dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar”.* (Wawancara Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 18 Januari 2021).

Berdasarkan tanggapan dari Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa Laporan keuangan akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika laporan keuangan tersebut mendapatkan opini selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari laporan keuangan masih belum maksimal dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar. Jika standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap

Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sebuah laporan keuangan yang baik Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai bagian keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator laporan keuangan dapat dipahami.

Tabel V.15 Tanggapan responden indikator dapat dipahami

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Penyajian terstandar	65	60	3	0	0	128
2	Mengandung pengetahuan yg memadai	65	56	6	0	0	127
3	Mudah dimengerti	65	64	0	0	0	129
Total tanggapan		195	180	9	0	0	384
Rentang skor							366,4 – 435
Kategori							Sangat Baik

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat 384 total jawaban tentang Laporan Keuangan dapat dipahami, sebanyak 195 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 180 total tanggapan responden pada skala baik, sebanyak total 9 total responden menjawab cukup baik.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai pengelola keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator andal adalah sebagai berikut : *“Laporan keuangan yang baik harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan karena laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah agar*

lebih baik kedepannya”. (Wawancara Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 18 Januari 2021).

Berdasarkan tanggapan dari Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban utama pemerintah kepada masyarakat umum juga parlemen harus memberikan informasi yang jelas sebagai bentuk representasi dari kinerja yang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Artinya bahwa baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Tabel V.16 Rekapitulasi tanggapan responden tentang Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Skor
			SB	B	CB	KB	TB	
1	Kualitas Laporan Keuangan	Relevan	330	276	30	0	0	636
2		Andal	270	212	27	0	0	509
3		Dapat dibandingkan	100	116	27	0	0	243
4		Dapat dipahami	195	180	9	0	0	384
Total tanggapan			895	784	93	0	0	1772
Rentang skor			1705,2 – 2030					
Kategori			Sangat Baik					

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2021

Dari tabel rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang Kualitas Laporan Keuangan dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 14 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat total 1772 total jawaban tentang variabel Kualitas Laporan Keuangan, sebanyak 895 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 784 total tanggapan atau responden berada pada skala baik dan 93 total tanggapan responden berada pada skala kategori cukup baik. Dengan rentang skor 1705,2 - 2030 masuk dalam kategori sangat baik.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada pegawai pengelola keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator andal adalah sebagai berikut : *“Laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja suatu instansi hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi*

tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal”. (Wawancara Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, 18 Januari 2021).

Berdasarkan tanggapan dari Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa Laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja suatu instansi hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal. Oleh sebab itu, laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban utama pemerintah kepada masyarakat umum juga parlemen harus memberikan informasi yang jelas sebagai bentuk representasi dari kinerja yang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Buton. Artinya bahwa baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintahan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan

keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan Negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah pada bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap penggunaan aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berupaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan, bidang pendapatan dan aset daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah. Adapun sistem-sistem informasi tersebut antara lain Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan, Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIMDIA), Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET),

Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil tanggapan responden sesuai dengan hasil observasi peneliti lapangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah masuk dalam kategori baik, hal ini sesuai dengan hasil audit dari BPK RI yang menyatakan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5.5. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi variabel-variabel mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Variabel yang diuji adalah variabel dependen (Akuntabilitas Pegawai) dan variabel independen (Kualitas Laporan Keuangan). Untuk mengetahui normalitas dapat digunakan skor sig. lebih besar atau sama dengan 0,05, maka berdistribusi normal, tetapi apabila kurang, maka data tidak berdistribusi normal (Azwar, 2011:43). Berikut untuk melihat hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel V.16 :

Tabel V.16 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.53310876
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.067
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan uji normalitas data menggunakan SPSS tersebut Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,200 dengan tingkat signifikansi yang berarti berada diatas 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel telah terdistribusi secara normal.

2) Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk menganalisa pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun bersama-sama (simultan) serta untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui atau menguji hipotesis parsial yaitu variabel Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, secara rinci dapat dilihat pada tabel V.17 dibawah ini :

Tabel V.17 : Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	375.798	1	375.798	17.635	.000 ^b
	Residual	575.374	27	21.310		
	Total	951.172	28			

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas

Berdasarkan persamaan regresi linier diketahui bahwa nilai F hitung = 17.635 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel Akuntabilitas Pegawai (X) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) atau secara statistik hipotesis diterima.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.783	7.826		3.678	.001
	Akuntabilitas	.480	.114	.629	4.199	.000

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan

Sumber : Olahan data SPSS 22

Regresi linier dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel dependent dan satu variabel independent. Bentuk persamaan regresi berupa :

$$Y = a + bx$$

$$Y = 28.783 + 0,480x$$

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. a = nilai konstanta, menunjukkan bahwa jika Akuntabilitas Pegawai adalah 0, maka Kualitas Laporan Keuangan adalah 28.783.
2. b = 0,480 merupakan nilai koefisien menunjukkan bahwa setiap kenaikan oleh akuntabilitas pegawai sebesar 1 point, maka Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,480.

3) Uji t (Uji Parsial)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dimensi variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial dapat mempengaruhi variabel terikat. Untuk lebih jauh mengenai hasil Uji t dapat dilihat dari tabel V.17 berikut ini :

Tabel V.17: Hasil Uji Parsial (Uji t)

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	akuntabilitas	68.07	34	7.634	1.418
	laporan keuangan	61.45	34	5.828	1.082

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	akuntabilitas & laporan keuangan	34	.629	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)		
			Std.	Std.	95% Confidence					
					Error				Interval of the	
									Mean	Difference
Mean	Deviation	Mean	Lower	Upper						
Pair 1	akuntabilitas - laporan keuangan	6.621	6.026	1.119	4.328	8.913	5.916	28	.000	

Sumber : Hasil olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel V.17 tersebut diatas untuk dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diatas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,5$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pegawai (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).
2. Berdasarkan nilai bahwa t_{hitung} adalah 5.916 pada t_{tabel} dengan $df = 28$ dan taraf signifikan 5% atau 0,005 diperoleh 6.621. Karena $t_{hitung} (5.916) > t_{tabel} (0,456)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Akuntabilitas Pegawai (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uji parsial diketahui H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel Akuntabilitas Pegawai terhadap Laporan Keuangan sebesar 5,916 sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5.6. Pembahasan

Dari hasil analisis data dan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Akuntabilitas Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal pada tahun 2020 dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Laporoan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha$ sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Hal ini berarti bahwa baik tidaknya akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Dari hasil penyebaran kuisioner tentang Akuntabilitas Pegawai dapat diketahui bahwa dari empat indikator dan 16 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat total 1998 total jawaban tentang variabel akuntabilitas pegawai, sebanyak 1035 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 736 total tanggapan atau responden berada pada skala baik, 219 total tanggapan responden berada pada skala kategori cukup baik dan 8 total

responden menjawab kurang baik. Dengan rentang skor 1949,8 – 2320 masuk dalam kategori sangat baik.

Dan dari rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang Kualitas Laporan Keuangan dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 14 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 34 orang responden maka didapat total 1772 total jawaban tentang variabel Kualitas Laporan Keuangan, sebanyak 895 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, sebanyak 784 total tanggapan atau responden berada pada skala baik dan 93 total tanggapan responden berada pada skala kategori cukup baik. Dengan rentang skor 1705,2 - 2030 masuk dalam kategori sangat baik.

Hasil observasi peneliti dilapangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah masuk dalam kategori baik, hal ini sesuai dengan hasil audit dari BPK RI yang menyatakan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uji normalitas data menggunakan SPSS tersebut Pengaruh Akuntabilitas Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan angka 0,200 dengan tingkat signifikansi yang berarti berada diatas 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel telah terdistribusi secara normal.

Berdasarkan persamaan regresi linier diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 17.635$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel Akuntabilitas Pegawai (X) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) atau secara statistik hipotesis diterima. Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut : $a =$ nilai konstanta, menunjukkan bahwa jika Akuntabilitas Pegawai adalah 0, maka Kualitas Laporan Keuangan adalah 28.783. $b = 0,480$ merupakan nilai koefisien menunjukkan bahwa setiap kenaikan oleh akuntabilitas pegawai sebesar 1 point, maka Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,480.

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dimensi variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial dapat mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diatas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,5$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pegawai (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Berdasarkan nilai bahwa t_{hitung} adalah 5.916 pada t_{tabel} dengan $df = 28$ dan taraf signifikan 5% atau 0,005 diperoleh 6.621. Karena $t_{hitung} (5.916) > t_{tabel} (0,456)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Akuntabilitas Pegawai (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uji parsial diketahui H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel Akuntabilitas Pegawai terhadap Laporan Keuangan sebesar 5,916 sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden tentang Akuntabilitas Pegawai dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa baik tidaknya akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.
2. Berdasarkan hasil tanggapan responden tentang kualitas laporan keuangan dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja suatu instansi hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal. Oleh sebab itu,

laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban utama pemerintah kepada masyarakat umum juga parlemen harus memberikan informasi yang jelas sebagai bentuk representasi dari kinerja yang dilakukan

3. Hasil observasi peneliti lapangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah masuk dalam kategori baik, hal ini sesuai dengan hasil audit dari BPK RI yang menyatakan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pelalawan sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

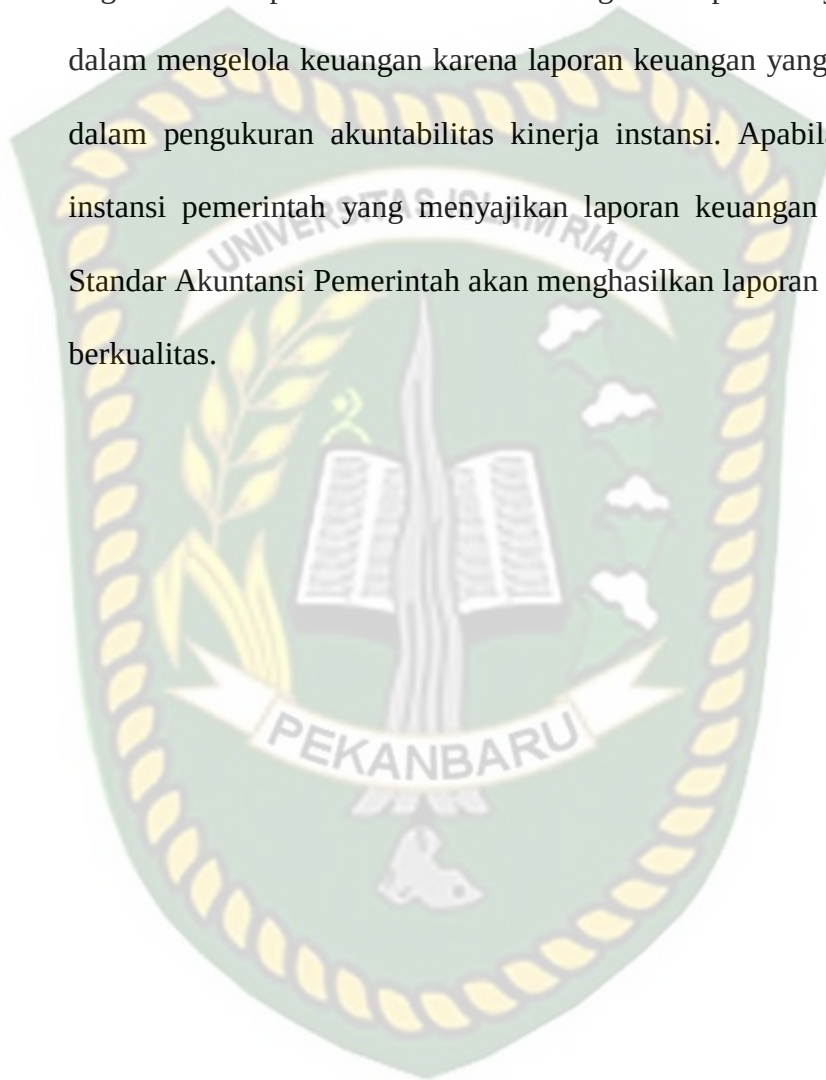
6.2. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan BKPAD diharapkan untuk memberikan pengawasan lebih kepada pegawai, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, karena dalam mengelola keuangan sering terjadi permasalahan – permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada daerah maupun Negara.
2. Pimpinan diharapkan juga dapat lebih memotivasi pegawai, mengingat akuntabilitas pegawai sudah baik dalam mengelola keuangan sehingga pimpinan dapat memberikan *reward* kepada pegawai yang sudah

berprestasi terutama pada bagian pengelola keuangan karena tugasnya tergolong sulit dan kuantitas pekerjaannya cukup banyak.

3. Pegawai diharapkan untuk selalu meningkatkan prestasi yang diperoleh dalam mengelola keuangan karena laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi. Apabila akuntabilitas instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Arief. Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1986). Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Batinggi, Ahmad (1999). Manajerial Pelayanan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Edwards, Jack E, John C. Scott, and Nambury S. Raju. 2007. Evaluating Human Resources Programs: A 6-Phase Approach for Optimizing Performance. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Fandy Tjiptono, 2004, Strategi Pemasaran, edisi kedua, Andi,. Yogyakarta.
- Gaspersz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.
- Handyaningrat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung
- Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Ibrahim. 2008. Prinsip-Prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Andi.
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2005). Transferring learning to behavior: Using the four levels to improve performance. San Fransisco: BerrettKoehler Publishers.
- Lijan, Sinambela. 2014 . Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lukman, Sampara. 2001. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan prima. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.

- Moenir, 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
- Parasuraman. 1990. Delivering Quality Service. New york: The Free. Press.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2014. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.P Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 1999, Restruktur dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual, Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua, Penerbit : Mandar Maju. Bandung.
- Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto dan Burhanuddin. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Penerbit CAPS, Yogyakarta.

- Syafiie, Inu Kencana dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta,. Jakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Syafiie. Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry L. 1985. "Problems and Strategies in Services Marketing". Jurnal of Marketing Vol. 49. (Spring).

Dokumen Pendukung Lainnya :

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil